



LAPORAN KINERJA

**PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2026 (TRIWULAN II)**

DISUSUN OLEH :

**BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan taufik, hidayah, dan rahmat-Nya sehingga Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026 Triwulan II (sampai dengan bulan Juni 2026) dapat diselesaikan dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, seluruh kegiatan yang didanai melalui APBD harus memenuhi aspek pembinaan, pengendalian, dan pengawasan. Pengendalian kegiatan dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dapat mencapai target secara tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, dan tepat sasaran.

Pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Sukoharjo sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2026 (bulan Juni 2026) telah disajikan dalam laporan ini sebagai bahan Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan APBD yang telah dilaksanakan sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan strategi pelaksanaan pada triwulan berikutnya agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada masa yang akan datang.

Demikian kata pengantar ini disusun. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi, pengendalian, dan pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.

Sukoharjo, Juli 2026

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo

Yudi Saharjo, SE, MM
Pembina
NIP 197603102011011006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pendahuluan	1
B. Dasar Hukum.....	2
BAB II STRUKTUR APBD	3
BAB III REALISASI KEUANGAN/PENYERAPAN APBD	5
A. Pagu Anggaran/Belanja.....	5
B. Target (Angkas).....	6
C. Realisasi Belanja.....	6
D. Perbandingan Realisasi Belanja Dengan Tahun Sebelumnya	7
BAB IV REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).....	9
BAB V KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN	11
A. Perbandingan Realisasi Keuangan dengan Pagu	11
B. Perbandingan Realisasi Keuangan Dengan Target Kabupaten	13
C. Perbandingan Realisasi Keuangan Dengan Target Angkas OPD	14
D. Perbandingan Kinerja OPD Dengan Tahun Sebelumnya	16
BAB VI BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH	18
A. Rincian Alokasi Bantuan Keuangan APBD Provinsi	18
B. Perkembangan Pelaksanaan Bantuan Keuangan APBD Provinsi.....	19
BAB VII PROYEK STRATEGIS	21
BAB VIII INFRASTRUKTUR	24
BAB IX PENUTUP.....	25
A. Kesimpulan.....	25
B. Rekomendasi.....	25

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I	: Perbandingan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2026 s.d Bulan Juni 2026 Terhadap Pagu
Lampiran II	: Perbandingan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2026 s.d Bulan Juni 2026 Terhadap Target Angkas
Lampiran III	: Perbandingan Realisasi APBD s.d Bulan Juni 2026 Tahun Anggaran 2025 dengan Tahun 2026
Lampiran IV	: Perkembangan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 s.d Bulan Juni 2026
Lampiran V	: Progres Pelaksanaan Proyek Strategis s.d Triwulan II 2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Laporan Kinerja APBD Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Triwulan II Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sampai dengan akhir Triwulan II. Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, laporan ini menjadi salah satu sarana dalam mendukung penerapan prinsip *good governance* melalui penyajian informasi yang akurat, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai dokumen evaluasi pada pertengahan Tahun Anggaran, laporan ini menyajikan informasi mengenai realisasi anggaran, capaian fisik kegiatan, serta hasil analisis kinerja perangkat daerah sampai dengan Triwulan II. Analisis tersebut mencakup perbandingan antara target dan realisasi pelaksanaan kegiatan serta identifikasi perkembangan pelaksanaan APBD sampai dengan Triwulan II. Dengan demikian, laporan ini memberikan gambaran mengenai perkembangan pelaksanaan APBD sebagai dasar evaluasi kinerja perangkat daerah.

Evaluasi pada Triwulan II memiliki peran penting karena memberikan gambaran mengenai kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan selama semester pertama. Melalui evaluasi ini dapat diketahui tingkat pencapaian target, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, serta aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar dalam menyusun langkah percepatan dan penyempurnaan pelaksanaan program pada Triwulan III dan IV agar target kinerja dan penyerapan anggaran dapat tercapai secara optimal.

Informasi yang disajikan dalam laporan ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan perangkat daerah dalam mengambil kebijakan dan menetapkan langkah strategis pada triwulan berikutnya. Selain itu, laporan ini juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, meningkatkan disiplin anggaran, serta mendorong optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui penyusunan laporan ini, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan. Penyajian data yang akurat dan analisis yang objektif diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat serta menjadi dasar dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah hingga akhir Tahun Anggaran 2026.

B. DASAR HUKUM

Mekanisme anggaran dan pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026 didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

BAB II STRUKTUR APBD

Struktur belanja APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Struktur APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	584.753.782.401	584.753.782.401	-
04.01.01	Pajak Daerah	367.140.000.000	367.140.000.000	-
04.01.02	Retribusi Daerah	124.796.536.694	124.796.536.694	-
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	43.581.050.000	43.581.050.000	-
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	49.236.195.707	49.236.195.707	-
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	1.296.833.780.392	1.296.833.780.392	-
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.191.287.339.620	1.191.287.339.620	-
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	105.546.440.772	113.377.440.772	7.831.000.000
	Jumlah Pendapatan	1.881.587.562.793	1.889.418.562.793	7.831.000.000
5	BELANJA DAERAH			
05.01	BELANJA OPERASI	1.588.775.936.121	1.596.324.556.131	7.548.620.010
05.01.01	Belanja Pegawai	977.510.074.743	977.505.675.467	(4.399.276)
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	562.108.635.305	554.943.204.591	(7.165.430.714)
05.01.04	Belanja Subsidi	756.864.073	756.864.073	-
05.01.05	Belanja Hibah	40.778.062.000	55.476.512.000	14.698.450.000
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	7.622.300.000	7.642.300.000	20.000.000
05.02	BELANJA MODAL	126.557.391.980	127.276.348.770	718.956.790
05.02.01	Belanja Modal Tanah	4.000.000.000	3.702.209.000	(297.791.000)
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.852.579.027	21.975.020.317	(3.877.558.710)
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.031.321.500	45.220.781.500	189.460.000
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.040.241.000	49.677.723.500	4.637.482.500
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.633.250.453	6.700.614.453	67.364.000

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.421.895.692	5.064.318.892	(1.357.576.800)
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	6.421.895.692	5.064.318.892	(1.357.576.800)
05.04	BELANJA TRANSFER	286.710.747.000	287.631.747.000	921.000.000
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	27.206.562.000	27.206.562.000	-
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	259.504.185.000	260.425.185.000	921.000.000
	Jumlah Belanja	2.008.465.970.793	2.016.296.970.793	7.831.000.000
	Total Surplus/(Defisit)	(126.878.408.000)	(126.878.408.000)	-
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	133.878.408.000	133.878.408.000	-
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	133.878.408.000	133.878.408.000	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	133.878.408.000	133.878.408.000	-
				-
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.000.000.000	7.000.000.000	-
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000	7.000.000.000	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7.000.000.000	7.000.000.000	-
	Pembiayaan Netto	126.878.408.000	126.878.408.000	-
06.03	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-

Sumber : BPKPAD Kabupaten Sukoharjo

BAB III

REALISASI KEUANGAN/PENYERAPAN APBD

Pelaksanaan APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026 sampai dengan bulan Juni tahun 2026 berdasarkan laporan dari masing-masing Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut :

A. PAGU ANGGARAN BELANJA

Sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan pagu Anggaran Belanja yang dialokasikan ke dalam beberapa jenis belanja. Rincian pagu belanja disusun berdasarkan jenis belanja yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Dan Belanja Transfer.

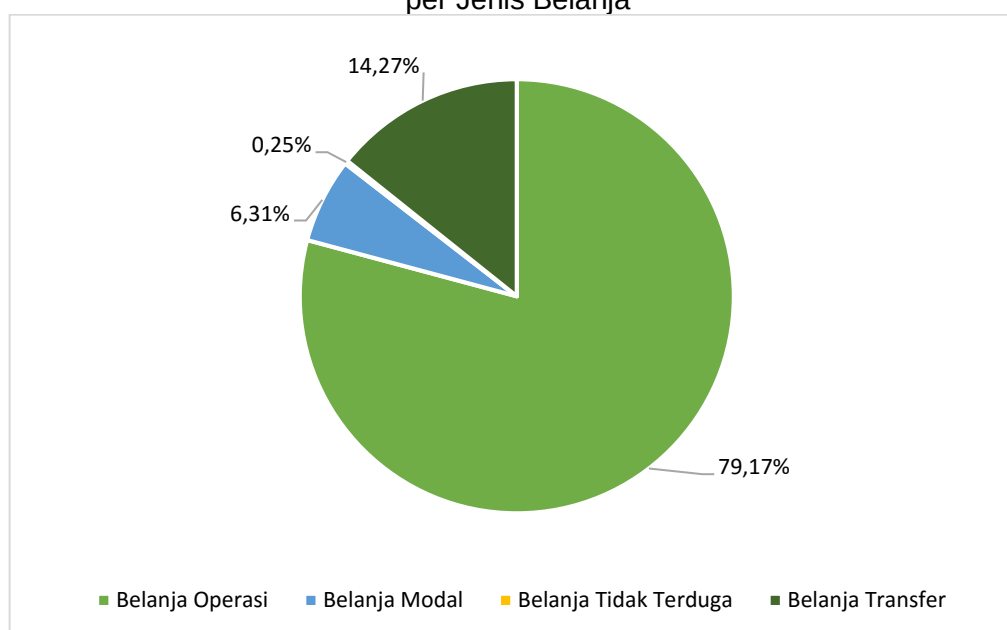
Adapun struktur dan besaran pagu anggaran berdasarkan jenis belanja disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Pagu Anggaran Belanja Kab. Sukoharjo Tahun 2026 per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	% thd Total Pagu
Belanja Operasi	Rp. 1.596.324.556.131	79,17%
Belanja Modal	Rp. 127.276.348.770	6,31%
Belanja Tidak Terduga	Rp. 5.064.318.892	0,25%
Belanja Transfer	Rp. 287.631.747.000	14,27%
Total Anggaran	Rp. 2.016.296.970.793	100%

Sumber : Data diolah

Grafik 3.1
Persentase Pagu Anggaran Belanja Kab. Sukoharjo Tahun 2026
per Jenis Belanja



Sumber : Data diolah

B. TARGET (ANGKAS)

Sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan dan evaluasi penyerapan APBD Tahun Anggaran 2026, telah ditetapkan target capaian keuangan sebagai acuan dalam pelaksanaan dan evaluasi penyerapan anggaran pada setiap jenis belanja. Target capaian keuangan sampai dengan bulan Juni 2026 berdasarkan jenis belanja disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Capaian Keuangan Kab. Sukoharjo Tahun 2026 per Jenis Belanja
s.d Juni 2026

Jenis Belanja	Target	% thd Pagu
Belanja Operasi	Rp. 1.264.281.084.491	79,20%
Belanja Modal	Rp. 78.502.338.231	61,68%
Belanja Tidak Terduga	Rp. 5.064.318.892	100%
Belanja Transfer	Rp. 277.510.747.000	96,48%
Total Target	Rp. 1.625.358.488.614	80,61%

Sumber : Data diolah

C. REALISASI BELANJA

Realisasi belanja merupakan indikator yang menggambarkan tingkat pelaksanaan APBD sampai dengan periode pelaporan (dalam hal ini Triwulan II). Berikut disajikan tingkat penyerapan anggaran pada masing-masing jenis belanja sehingga dapat diidentifikasi komponen belanja yang masih perlu dioptimalkan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Rincian realisasi belanja Kabupaten Sukoharjo sampai dengan bulan Juni Tahun Anggaran 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Realisasi Belanja Kab. Sukoharjo Tahun 2026 per Jenis Belanja
s.d Juni 2026

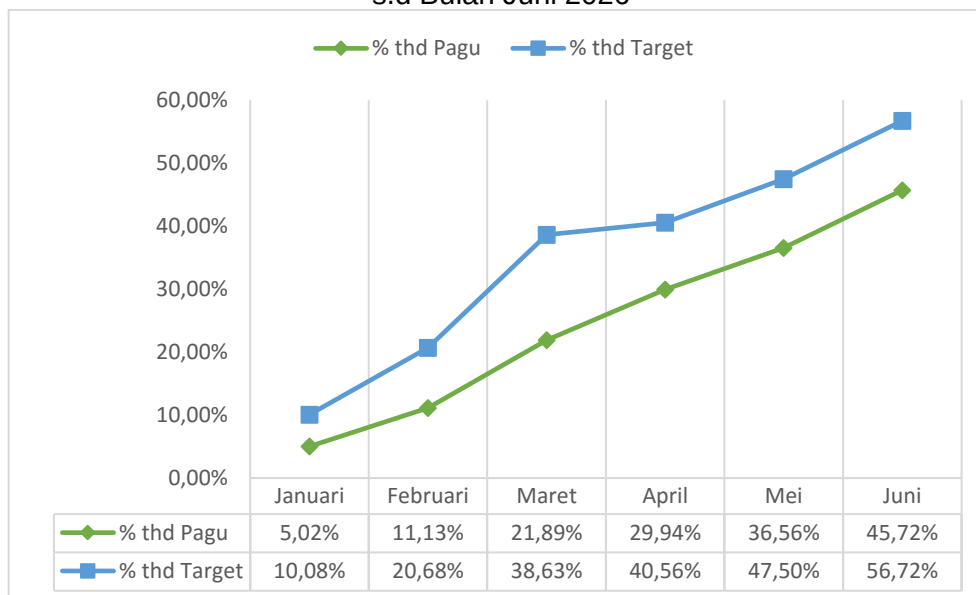
Jenis Belanja	Realisasi Belanja	% thd Pagu	% thd Target
Belanja Operasi	Rp. 785.659.167.497	49,22%	62,14%
Belanja Modal	Rp. 22.806.483.488	17,92%	29,05%
Belanja Tidak Terduga	Rp. 61.482.800	1,21%	1,21%
Belanja Transfer	Rp. 113.385.337.200	39,42%	40,86%
Total Realisasi	Rp. 921.912.470.985	45,72%	56,72%

Sumber : Data diolah

Untuk menggambarkan perkembangan penyerapan anggaran daerah selama tahun berjalan, berikut disajikan grafik tren realisasi belanja APBD Tahun

2026 per bulan. Grafik ini menunjukkan pola pertumbuhan realisasi belanja dari bulan Januari hingga Juni 2026.

Grafik 3.2
Perkembangan Realisasi Belanja APBD Kabupaten Sukoharjo
s.d Bulan Juni 2026



Sumber : Data diolah

D. PERBANDINGAN REALISASI BELANJA TAHUN BERJALAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Sebagai salah satu dasar evaluasi kinerja pengelolaan anggaran, berikut disajikan tabel dan grafik perbandingan realisasi belanja sampai dengan bulan Juni Tahun Anggaran 2026 dengan realisasi belanja sampai dengan bulan Juni Tahun Anggaran 2025. Perbandingan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan tingkat penyerapan anggaran serta perubahan pola belanja dari tahun sebelumnya, sehingga dapat menjadi acuan dalam penilaian efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

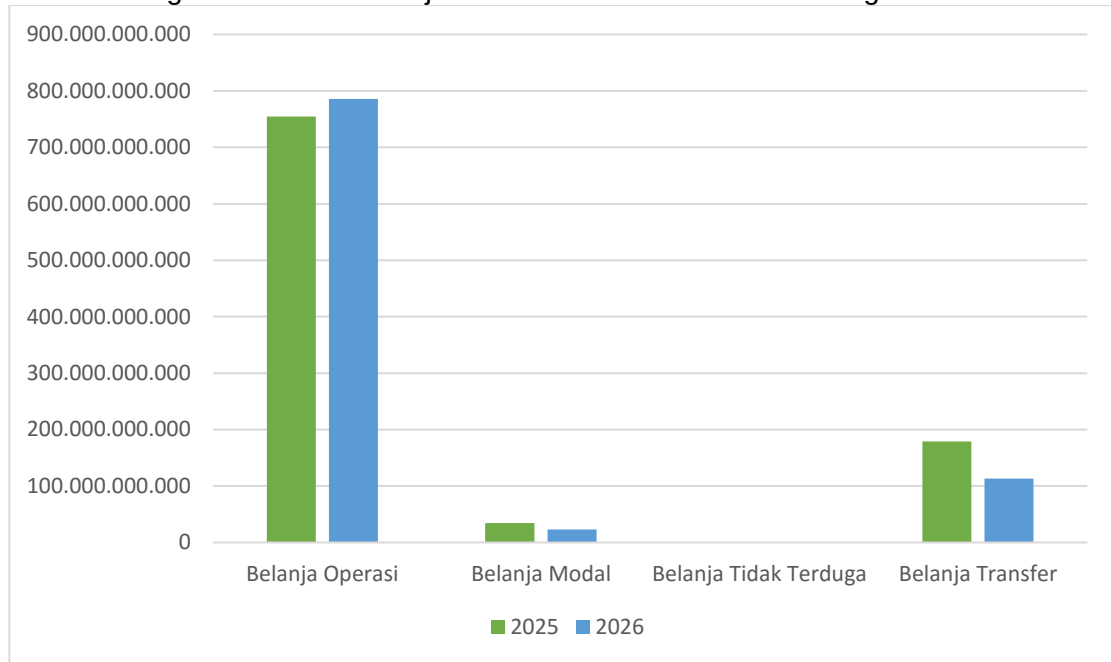
Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Belanja
s.d Bulan Juni Tahun 2026 dengan Tahun 2025

Jenis Belanja	Tahun 2025		Tahun 2026		(+/-) %
	Rp.	%	Rp.	%	
Belanja Operasi	754.532.320.436	44,62%	785.659.167.497	49,22%	4,60%
Belanja Modal	34.373.409.434	20,34%	22.806.483.488	17,92%	-2,42%
Belanja Tidak Terduga	93.456.000	0,80%	61.482.800	1,21%	0,41%
Belanja Transfer	179.092.408.192	53,92%	113.385.337.200	39,32%	-14,60%
Total Realisasi	968.091.594.062	43,93%	921.912.470.985	45,72%	1,79%

Sumber : Data diolah

Grafik 3.3

Perbandingan Realisasi Belanja s.d Bulan Juni Tahun 2026 dengan Tahun 2025



Sumber : Data diolah

BAB IV REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 275.618.023.922,00 (47,13%) dari total Anggaran sebesar Rp. 584.753.782.401,00. Adapun realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan 30 Juni 2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 s.d 30 Juni 2026

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4	PENDAPATAN DAERAH	1.889.418.562.793	758.021.301.350	40,11
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	584.753.782.401	275.618.023.922	47,13
4.1.01	Pajak Daerah	367.140.000.000	176.984.348.723	48,20
4.1.02	Retribusi Daerah	124.796.536.694	53.787.275.219	43,09
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	43.581.050.000	22.714.199.495	52,11
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	49.236.195.707	22.132.200.485	44,95
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	584.753.782.401	275.618.023.922	47,13
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.304.664.780.392	482.403.277.428	36,97
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.191.287.339.620	441.783.911.689	37,08
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	19.344.546.000	4.928.043.950	25,47
4.2.01.07.001	DBH Pajak	18.921.166.000	4.730.289.750	24,99
4.2.01.07.002	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	423.380.000	197.754.200	46,70
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	760.481.391.000	378.540.690.000	49,77
4.2.01.08.001	DAU yang Tidak Ditentukan	757.081.391.000	378.540.690.000	49,99
4.2.01.08.002	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	3.400.000.000	-	-
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	274.656.994.620	58.315.177.739	21,23
4.2.01.09.002	DAK Non Fisik	274.656.994.620	58.315.177.739	21,23
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	1.054.482.931.620	441.783.911.689	41,89
4.2.01.05	Dana Desa	136.804.408.000	-	-
4.2.01.05.001	Dana Desa	136.804.408.000	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	136.804.408.000	-	-

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	113.377.440.772	40.619.365.739	35,82
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	105.546.440.772	39.698.365.739	37,61
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	7.831.000.000	921.000.000	11,76
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	113.377.440.772	40.619.365.739	35,82
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.304.664.780.392	482.403.277.428	36,97
	JUMLAH PENDAPATAN	1.889.418.562.793	758.021.301.350	40,11

Sumber : BPKPAD Kabupaten Sukoharjo

BAB V

KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PERBANDINGAN REALISASI KEUANGAN DENGAN PAGU

Data perbandingan realisasi APBD Tahun 2026 sampai dengan bulan Juni 2026 terhadap pagu memberikan gambaran mengenai capaian realisasi anggaran masing-masing OPD terhadap pagu anggaran yang telah dialokasikan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Perbandingan Realisasi Keuangan dengan Pagu Kab. Sukoharjo
s.d Juni 2026

RANK	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Dinas Sosial	17.889.976.940	11.505.565.399	64,31
2	Rumah Sakit Umum Daerah	101.800.000.000	60.015.775.700	58,95
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	599.427.177.710	350.471.807.751	58,47
4	Dinas Perhubungan	46.821.199.170	23.977.687.496	51,21
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.195.936.000	1.516.385.929	47,45
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21.925.287.400	10.396.234.281	47,42
7	Kecamatan Gatak	3.500.455.274	1.648.188.350	47,08
8	Sekretariat Daerah	57.584.201.300	26.633.363.862	46,25
9	Dinas Lingkungan Hidup	31.145.523.299	14.245.288.616	45,74
10	Satuan Polisi Pamong Praja	14.980.493.900	6.720.375.499	44,86
11	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7.899.424.141	3.504.056.553	44,36
12	Dinas Kesehatan	327.432.287.517	142.830.458.484	43,62
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	16.394.619.645	7.057.065.891	43,05
14	Sekretariat DPRD	78.361.380.309	33.618.369.944	42,90
15	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	7.703.325.920	3.252.456.037	42,22
16	Kecamatan Grogol	3.134.666.000	1.317.636.874	42,03
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.489.134.502	3.104.620.779	41,46
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	12.117.147.900	4.998.982.462	41,26
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.261.646.000	4.641.568.965	41,22
20	Kecamatan Bendosari	4.665.835.808	1.902.898.441	40,78
21	Kecamatan Mojolaban	3.243.433.232	1.313.641.221	40,50
22	Inspektorat Daerah	10.213.972.000	4.081.034.423	39,96
23	Kecamatan Polokarto	3.243.906.000	1.283.584.614	39,57
24	Kecamatan Nguter	3.068.998.000	1.211.009.128	39,46
25	Kecamatan Baki	3.348.790.000	1.298.487.257	38,77
26	Dinas Pangan	5.624.270.280	2.153.451.517	38,29
27	Kecamatan Bulu	2.985.390.755	1.120.774.289	37,54
28	Kecamatan Tawangsari	3.075.321.300	1.151.655.050	37,45
29	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	334.364.326.185	124.892.877.580	37,35

RANK	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
30	Kecamatan Weru	3.011.279.000	1.116.071.678	37,06
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.628.431.730	3.538.677.776	36,75
32	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.819.057.202	3.909.537.618	36,14
33	Kecamatan Kartasura	6.848.267.634	2.473.240.975	36,11
34	Dinas Pertanian dan Perikanan	21.267.543.235	7.637.454.654	35,91
35	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.714.083.000	2.646.707.539	34,31
36	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	33.210.127.124	11.375.211.656	34,25
37	Kecamatan Sukoharjo	27.535.402.100	9.266.594.820	33,65
38	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	15.719.057.000	5.160.362.974	32,83
39	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	16.914.292.000	5.389.942.282	31,87
40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	118.621.834.281	17.533.366.621	14,78
	JUMLAH	2.016.296.970.793	921.912.470.985	45,72

Sumber : Data diolah

Dari data tersebut, kemudian dianalisis dan diperoleh 3 OPD dengan capaian realisasi APBD tertinggi dibandingkan Pagu Anggaran, yaitu :

1. Dinas Sosial sebesar 64,31%
2. Rumah Sakit Umum Daerah sebesar 58,95%
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 58,47%

Adapun 3 OPD dengan capaian realisasi APBD terendah, yaitu :

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 32,83%.
Dikarenakan belum berjalannya pelaksanaan fisik pada sejumlah paket kegiatan. Saat ini, terdapat 48 paket kegiatan perbaikan jalan kelurahan (30 paket dari Pokir dan 18 paket dari APBD) yang masih tertahan di tahap Pengadaan Barang dan Jasa. Selain itu, terdapat 8 paket perbaikan PSU perumahan yang saat ini masih berada di tahap Perencanaan.
2. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar 31,87%.
Dikarenakan sebagian kegiatan dijadwalkan dilaksanakan pada Triwulan III hingga Triwulan IV. Kegiatan tersebut antara lain penyaluran beasiswa, rehabilitasi Gelora Jombor, penyelenggaraan POPDA tingkat kabupaten, karesidenan, dan provinsi, serta berbagai kegiatan yang bersifat periodik seperti peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Sukoharjo, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Sumpah Pemuda, dan Jambore Pemuda. Selain itu, terdapat alokasi belanja untuk pembayaran tenaga *outsourcing* dan gaji PPPK paruh waktu yang akan direalisasikan sesuai jadwal pembayaran.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebesar 14,78%.
Dikarenakan sebagian besar kegiatan masih dalam tahap persiapan, khususnya proses pengadaan, seperti penyusunan DED, proses di UKPBJ, dan tahapan administrasi lainnya.

Rekapitulasi perbandingan realisasi APBD terhadap pagu oleh masing-masing Perangkat Daerah sampai dengan bulan Juni 2026 secara rinci tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisah dari laporan ini.

B. PERBANDINGAN REALISASI KEUANGAN DENGAN TARGET KABUPATEN

Tabel perbandingan realisasi keuangan dengan target kabupaten merupakan bentuk analisis untuk melihat tingkat capaian kinerja keuangan masing-masing OPD dalam mendukung target pembangunan kabupaten secara keseluruhan, dan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.2
Perbandingan Realisasi Keuangan dengan Target Kabupaten Kab. Sukoharjo
s.d. Juni 2026

RANK	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET KAB
1	Dinas Sosial	17.889.976.940	11.505.565.399	64,31	50%
2	Rumah Sakit Umum Daerah	101.800.000.000	60.015.775.700	58,95	50%
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	599.427.177.710	350.471.807.751	58,47	50%
4	Dinas Perhubungan	46.821.199.170	23.977.687.496	51,21	50%
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.195.936.000	1.516.385.929	47,45	50%
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21.925.287.400	10.396.234.281	47,42	50%
7	Kecamatan Gatak	3.500.455.274	1.648.188.350	47,08	50%
8	Sekretariat Daerah	57.584.201.300	26.633.363.862	46,25	50%
9	Dinas Lingkungan Hidup	31.145.523.299	14.245.288.616	45,74	50%
10	Satuan Polisi Pamong Praja	14.980.493.900	6.720.375.499	44,86	50%
11	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7.899.424.141	3.504.056.553	44,36	50%
12	Dinas Kesehatan	327.432.287.517	142.830.458.484	43,62	50%
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	16.394.619.645	7.057.065.891	43,05	50%
14	Sekretariat DPRD	78.361.380.309	33.618.369.944	42,90	50%
15	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	7.703.325.920	3.252.456.037	42,22	50%
16	Kecamatan Grogol	3.134.666.000	1.317.636.874	42,03	50%
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.489.134.502	3.104.620.779	41,46	50%
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	12.117.147.900	4.998.982.462	41,26	50%
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.261.646.000	4.641.568.965	41,22	50%
20	Kecamatan Bendosari	4.665.835.808	1.902.898.441	40,78	50%
21	Kecamatan Mojolaban	3.243.433.232	1.313.641.221	40,50	50%
22	Inspektorat Daerah	10.213.972.000	4.081.034.423	39,96	50%
23	Kecamatan Polokarto	3.243.906.000	1.283.584.614	39,57	50%

RANK	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET KAB
24	Kecamatan Nguter	3.068.998.000	1.211.009.128	39,46	50%
25	Kecamatan Baki	3.348.790.000	1.298.487.257	38,77	50%
26	Dinas Pangan	5.624.270.280	2.153.451.517	38,29	50%
27	Kecamatan Bulu	2.985.390.755	1.120.774.289	37,54	50%
28	Kecamatan Tawangsari	3.075.321.300	1.151.655.050	37,45	50%
29	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	334.364.326.185	124.892.877.580	37,35	50%
30	Kecamatan Weru	3.011.279.000	1.116.071.678	37,06	50%
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.628.431.730	3.538.677.776	36,75	50%
32	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.819.057.202	3.909.537.618	36,14	50%
33	Kecamatan Kartasura	6.848.267.634	2.473.240.975	36,11	50%
34	Dinas Pertanian dan Perikanan	21.267.543.235	7.637.454.654	35,91	50%
35	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.714.083.000	2.646.707.539	34,31	50%
36	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	33.210.127.124	11.375.211.656	34,25	50%
37	Kecamatan Sukoharjo	27.535.402.100	9.266.594.820	33,65	50%
38	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	15.719.057.000	5.160.362.974	32,83	50%
39	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	16.914.292.000	5.389.942.282	31,87	50%
40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	118.621.834.281	17.533.366.621	14,78	50%
	JUMLAH	2.016.296.970.793	921.912.470.985	45,72	50%

Sumber : Data diolah

C. PERBANDINGAN REALISASI KEUANGAN DENGAN TARGET ANGKAS OPD

Untuk menilai pencapaian kinerja OPD, dilakukan evaluasi dengan cara membandingkan realisasi keuangan dengan target angkas yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun perbandingan antara realisasi keuangan dengan target angkas hingga periode bulan Juni 2026 diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.3
Perbandingan Realisasi Keuangan dengan Target Angkas OPD Kab. Sukoharjo
s.d. Juni 2026

RANK	PERANGKAT DAERAH	TARGET OPD	REALISASI	%
1	Rumah Sakit Umum Daerah	64.514.816.000	60.015.775.700	93,03
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	424.939.636.529	350.471.807.751	82,48
3	Kecamatan Bulu	1.492.695.378	1.120.774.289	75,08
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.274.959.000	3.104.620.779	72,62
5	Dinas Sosial	16.719.320.190	11.505.565.399	68,82
6	Inspektorat Daerah	6.403.102.000	4.081.034.423	63,74

RANK	PERANGKAT DAERAH	TARGET OPD	REALISASI	%
7	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	11.355.092.245	7.057.065.891	62,15
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16.799.669.500	10.396.234.281	61,88
9	Dinas Perhubungan	40.454.721.772	23.977.687.496	59,27
10	Kecamatan Bendosari	3.286.526.808	1.902.898.441	57,90
11	Sekretariat DPRD	61.115.363.203	33.618.369.944	55,01
12	Satuan Polisi Pamong Praja	12.554.815.500	6.720.375.499	53,53
13	Kecamatan Tawangsari	2.211.128.972	1.151.655.050	52,08
14	Dinas Kesehatan	277.298.718.992	142.830.458.484	51,51
15	Kecamatan Gatak	3.244.872.674	1.648.188.350	50,79
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.016.812.000	1.516.385.929	50,26
17	Kecamatan Weru	2.243.761.000	1.116.071.678	49,74
18	Dinas Pangan	4.379.957.530	2.153.451.517	49,17
19	Sekretariat Daerah	55.347.963.300	26.633.363.862	48,12
20	Dinas Pertanian dan Perikanan	16.010.274.785	7.637.454.654	47,70
21	Dinas Lingkungan Hidup	30.145.523.299	14.245.288.616	47,26
22	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7.460.647.541	3.504.056.553	46,97
23	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10.915.769.700	4.998.982.462	45,80
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	7.124.467.520	3.252.456.037	45,65
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.579.400.202	3.909.537.618	45,57
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.356.950.500	4.641.568.965	44,82
27	Kecamatan Grogol	3.008.557.000	1.317.636.874	43,80
28	Kecamatan Nguter	2.924.568.000	1.211.009.128	41,41
29	Kecamatan Baki	3.143.128.000	1.298.487.257	41,31
30	Kecamatan Mojolaban	3.202.650.732	1.313.641.221	41,02
31	Kecamatan Polokarto	3.175.026.000	1.283.584.614	40,43
32	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	13.061.431.000	5.160.362.974	39,51
33	Kecamatan Kartasura	6.424.679.134	2.473.240.975	38,50
34	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	324.663.453.695	124.892.877.580	38,47
35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.288.706.230	3.538.677.776	38,10
36	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.070.175.000	2.646.707.539	37,43
37	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	14.414.292.000	5.389.942.282	37,39
38	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	30.807.152.924	11.375.211.656	36,92
39	Kecamatan Sukoharjo	25.535.789.600	9.266.594.820	36,29
40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	76.391.913.159	17.533.366.621	22,95
	JUMLAH	1.625.358.488.614	921.912.470.985	56,72

Sumber : Data diolah

Rekapitulasi perbandingan realisasi APBD terhadap target angkas masing-masing Perangkat Daerah sampai dengan bulan Juni 2026 secara rinci tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisah dari laporan ini.

D. PERBANDINGAN KINERJA OPD DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Untuk memberikan gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, disajikan perbandingan kinerja OPD Tahun Anggaran 2026 dan Tahun Anggaran 2025, masing-masing sampai dengan bulan Juni . Penyajian perbandingan ini dimaksudkan untuk menilai perkembangan efektivitas pelaksanaan anggaran, mengidentifikasi peningkatan maupun penurunan kinerja, serta memastikan bahwa setiap OPD menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan adanya perbandingan ini, diharapkan dapat diperoleh dasar yang lebih objektif dalam mengevaluasi kinerja, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan perbaikan kinerja pada periode selanjutnya.

Tabel 5.4
Perbandingan Kinerja OPD s.d Bulan Juni Tahun 2026 dengan Tahun 2025

RANK	PERANGKAT DAERAH	TA 2025 (%)	TA 2026 (%)	(+/-) %
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12,94	36,75	23,81
2	Dinas Sosial	49,88	64,31	14,44
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	47,15	58,47	11,32
4	Dinas Perhubungan	40,55	51,21	10,66
5	Rumah Sakit Umum Daerah	49,05	58,95	9,91
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	33,00	41,46	8,46
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	41,00	47,42	6,42
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	43,69	47,45	3,75
9	Satuan Polisi Pamong Praja	41,93	44,86	2,93
10	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	41,46	44,36	2,90
11	Sekretariat Daerah	43,45	46,25	2,80
12	Dinas Lingkungan Hidup	43,27	45,74	2,47
13	Inspektorat Daerah	38,27	39,96	1,68
14	Kecamatan Grogol	40,57	42,03	1,47
15	Kecamatan Kartasura	34,67	36,11	1,45
16	Dinas Pertanian dan Perikanan	34,62	35,91	1,29
17	Kecamatan Gatak	46,61	47,08	0,48
18	Kecamatan Mojolaban	40,24	40,50	0,27
19	Kecamatan Nguter	39,32	39,46	0,14
20	Dinas Kesehatan	43,57	43,62	0,05
21	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	43,26	43,05	-0,21
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	43,16	42,22	-0,94
23	Kecamatan Bendosari	41,86	40,78	-1,08
24	Sekretariat DPRD	44,16	42,90	-1,26
25	Kecamatan Tawang Sari	39,53	37,45	-2,08
26	Kecamatan Bulu	40,20	37,54	-2,65
27	Dinas Pangan	41,23	38,29	-2,94
28	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	44,34	41,26	-3,08
29	Kecamatan Polokarto	42,69	39,57	-3,12

RANK	PERANGKAT DAERAH	TA 2025 (%)	TA 2026 (%)	(+/-) %
30	Kecamatan Baki	45,36	38,77	-6,59
31	Kecamatan Weru	44,45	37,06	-7,39
32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22,39	14,78	-7,61
33	Kecamatan Sukoharjo	42,36	33,65	-8,71
34	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	43,63	34,31	-9,32
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	51,26	41,22	-10,05
36	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	45,77	34,25	-11,51
37	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	49,22	37,35	-11,87
38	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	47,47	32,83	-14,64
39	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	46,68	31,87	-14,81
40	Dinas Komunikasi dan Informatika	57,33	36,14	-21,20
	JUMLAH	43,93	45,72	1,79

Sumber : Data diolah

Rekapitulasi perbandingan belanja masing-masing Perangkat Daerah sampai dengan Juni 2026 Tahun Anggaran 2026 dan Tahun Anggaran 2025 secara rinci tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisah dari laporan ini.

BAB VI

BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH

A. RINCIAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN APBD PROVINSI

Berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/13/2026 tanggal 10 Juni 2026 perihal Penyampaian DPPA Belanja Transfer APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada perubahan alokasi Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

Untuk Kabupaten Sukoharjo semula mendapatkan bantuan sebesar Rp. 7.831.000.000,00 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) untuk 7 (tujuh) kegiatan seperti berikut :

Tabel 6.1
Daftar Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi APBD Tahun Anggaran 2026
Sebelum Perubahan

No.	Nama Kegiatan	OPD Pengampu	Pagu (Rp.)
1.	TMMD	DPMD	921.000.000
2.	Pembangunan embung Dk.Melikan RT. 2 RW. 1, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Nguter	DISPERTANIKAN	1.000.000.000
3.	Pembangunan talud/penahan tebing/ pembentuk badan jalan/ pembangunan talud jalan Kecamatan Sukoharjo	DPKP	350.000.000
4.	Rehabilitasi jaringan irigasi Bendungan Siluwur, Desa Tegalsari Kecamatan Weru	DPUPR	3.050.000.000
5.	Rehabilitasi jaringan irigasi Dk. Gangin Kulon Desa Karangterngah Kecamatan Weru	DISPERTANIKAN	1.000.000.000
6.	Rekonstruksi jalan Pembangunan Rabat jalan Kecamatan Sukoharjo	DPKP	970.000.000
7.	Rekonstruksi jalan pengaspalan jalan hotmix Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Bendosari	DPKP	540.000.000
JUMLAH			7.831.000.000

Setelah diberlakukannya kebijakan efisiensi anggaran yang diatur melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, alokasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten Sukoharjo menjadi sebesar Rp. 2.781.000.000,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah) yang dialokasikan untuk 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:

Tabel 6.2

Daftar Kegiatan Bantuan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2026 Setelah Perubahan

No.	Nama Kegiatan	OPD Pengampu	Pagu (Rp.)
1.	TMMD	DPMD	921.000.000
2.	Pembangunan talud/penahan tebing/pembentuk badan jalan/pembangunan talud jalan Kecamatan Sukoharjo	DPKP	350.000.000
3.	Rekonstruksi jalan Pembangunan Rabat jalan Kecamatan Sukoharjo	DPKP	970.000.000
4.	Rekonstruksi jalan pengaspalan jalan hotmix Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Bendosari	DPKP	540.000.000
JUMLAH			2.781.000.000

B. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN APBD PROVINSI

Adapun perkembangan dari kegiatan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 Setelah Perubahan sampai dengan Bulan Juni 2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Penginputan RKO (Rencana Kerja Operasional) pada Aplikasi SIVERO
 - a. Pada bulan April sampai dengan akhir bulan Mei 2026, aplikasi SIVERO tidak bisa diakses karena dalam proses *maintenance*, sehingga menghambat proses penginputan Rencana Kerja Operasional (RKO).
 - b. Adapun OPD pengampu yang sudah menginput RKO adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu untuk kegiatan TMMD. Hal ini dikarenakan TMMD merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin tiap tahun sehingga penginputan RKO telah dilakukan sebelum bulan Februari 2026.
 - c. DPKP masih dalam proses penginputan dokumen pada SIVERO dan untuk dokumen yang belum diinput adalah dokumen RAB dan DED.
2. Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Bantuan Keuangan APBD Provinsi

Capaian realisasi fisik dan keuangan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Sukoharjo APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 sampai dengan bulan Juni 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 6.3

Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota APBD
Provinsi Jawa Tengah TA 2026 s.d Juni 2026

KEGIATAN	APBD PROVINSI	NILAI KONTRAK/ SWAKELOLA	REALISASI		REALISASI FISIK (%)
			KEUANGAN	% DARI KONTRAK/ SWAKELOLA	
DPMD					
Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD)	921.000.000	921.000.000	490.000.000	53,20	50
DPKP					
Pembangunan Talud / Penahan Tebing / Pembentuk Badan Jalan Pembangunan Talud Jalan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	350.000.000	0	0	0	0
Rekonstruksi Jalan Pembangunan Rabat Jalan Kecamatan Sukoharjo Kab. Sukoharjo	970.000.000	0	0	0	0
Rekonstruksi Jalan Pengaspalan Jalan Hotmix Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Bendosari Kab. Sukoharjo	540.000.000	0	0	0	0
TOTAL	2.781.000.000	921.000.000	490.000.000		12,5

Sumber : Data diolah

Dari 4 (empat) kegiatan Bantuan Keuangan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2026 setelah perubahan, baru 1 (satu) kegiatan yang sudah mendapatkan verifikasi lengkap dari verifikator Provinsi, yaitu kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sementara itu, 3 (tiga) kegiatan lainnya yang diampu oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) sedang dalam proses penginputan Rencana Kerja Operasional (RKO) melalui aplikasi SIVERO dengan tahapan penyusunan DED (*Detail Engineering Design*) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya).

Kegiatan TMMD Sengkuyung I telah dilaksanakan di Desa Puron Kecamatan Bulu mulai tanggal 10 Februari sampai dengan 11 Juni 2026 dengan realisasi APBD Provinsi sebesar Rp. 245.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) sedangkan anggaran *sharing* yang digunakan sebesar Rp. 400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah).

Kegiatan TMMD Sengkuyung II telah dilaksanakan di Desa Genengsari Kecamatan Polokarto mulai tanggal 22 April sampai dengan 21 Mei 2026 dengan realisasi APBD Provinsi sebesar Rp. 245.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) sedangkan anggaran *sharing* yang digunakan sebesar Rp. 400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah).

Adapun rekapitulasi progres pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2026 sampai bulan Juni 2026 secara lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran IV yang tidak terpisah dari laporan ini.

BAB VII

PROYEK STRATEGIS

Proyek Strategis untuk Tahun 2026 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 000.7.6/595 Tahun 2025 tentang Penetapan Proyek Strategis Tahun 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 000.7.6/125 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 000.7.6/595 Tahun 2025 tentang Penetapan Proyek Strategis Tahun 2026.

Adapun perkembangan 10 (sepuluh) proyek strategis per 21 Juli 2026 sebagai berikut :

1. Pembangunan Masjid Kartasura (DPUPR)

Pagu Anggaran	: Rp. 25.000.000.000,00
Sumber Dana	: APBD
Nilai Kontrak	: Rp. 21.005.740.000,00
Nama Penyedia	: PT Usaha Gedung Mandiri
Jangka Waktu Pelaksanaan	: 220 Hari Kalender
Waktu Pelaksanaan	: 20 Mei – 25 Desember 2026
Target Fisik	: 6,42%
Realisasi Fisik	: 7,84%
Deviasi	: 1,42%
Realisasi Keuangan	: Rp. 0
2. Peningkatan Jalan Tanjunganom - Daleman (DPUPR)

Pagu Anggaran	: Rp. 19.200.000.000,00
Sumber Dana	: APBD
Nilai Kontrak	: Rp. 17.666.777.305,00
Nama Penyedia	: PT Jaya Sempurna Sakti
Jangka Waktu Pelaksanaan	: 225 Hari Kalender
Waktu Pelaksanaan	: 8 Juni – 4 Desember 2026
Target Fisik	: 27,82%
Realisasi Fisik	: 56,15%
Deviasi	: 28,33%
Realisasi Keuangan	: Rp. 3.533.355.461,00
3. Peningkatan Jalan Adi Sumarmo (DPUPR)

Pagu Anggaran	: Rp. 8.000.000.000,00
Sumber Dana	: APBD
Nilai Kontrak	: Rp. 6.124.838.000,00
Nama Penyedia	: CV Anugerah Lima Utama
Jangka Waktu Pelaksanaan	: 180 Hari Kalender
Waktu Pelaksanaan	: 8 Juni – 4 Desember 2026
Target Fisik	: 0,169%
Realisasi Fisik	: 37,531%
Deviasi	: 37,362%

- Realisasi Keuangan : Rp. 1.837.451.400,00
4. Pemeliharaan Pasar Kartasura (DISKOPUMDAG)
- Pagu Anggaran : Rp. 7.000.000.000,00
- Sumber Dana : APBD
- Nilai Kontrak : Rp. 5.405.000.000,00
- Nama Penyedia : PT Karya Mekar Konstruksi
- Jangka Waktu Pelaksanaan : 180 Hari Kalender
- Waktu Pelaksanaan : 2 Juni – 28 November 2026
- Target Fisik : 6,38%
- Realisasi Fisik : 8,57%
- Deviasi : 2,19%
- Realisasi Keuangan : Rp. 1.621.500.000,00
5. Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum di Jalan Kabupaten (DISHUB)
- Pagu Anggaran : Rp. 4.156.500.000,00
- Sumber Dana : APBD
- Nilai Kontrak : Rp. 3.660.451.551,00
- Nama Penyedia : CV Sinar Abadi Jaya
- Jangka Waktu Pelaksanaan : 90 Hari Kalender
- Waktu Pelaksanaan : 9 Januari – 8 Mei 2026
- Target Fisik : 100%
- Realisasi Fisik : 100%
- Deviasi : 0%
- Realisasi Keuangan : Rp. 3.660.451.551,00
- Tanggal PHO : 5 Mei 2026
6. Pembangunan Pujasera Alun-Alun Sukoharjo (DISKOPUMDAG)
- Pagu Anggaran : Rp.3.775.900.000,00
- Sumber Dana : APBD
- Nilai Kontrak : Rp. 2.922.539.000,00
- Nama Penyedia : CV Bandung Bondowoso
- Jangka Waktu Pelaksanaan : 180 Hari Kalender
- Waktu Pelaksanaan : 22 Juni – 18 Desember 2026
- Target Fisik : 7,39%
- Realisasi Fisik : 7,71%
- Deviasi : 0,32%
- Realisasi Keuangan : Rp. 876.761.700,00
7. Peningkatan Jalan Tawang Sari-Pojok (DPUPR)
- Pagu Anggaran : Rp. 2.500.000.000,00
- Sumber Dana : APBD
- Nilai Kontrak : Rp. 1.996.344.000,00
- Nama Penyedia : CV Banyu Mili
- Jangka Waktu Pelaksanaan : 180 Hari Kalender
- Waktu Pelaksanaan : 08 Juni – 4 Desember 2026

- | | |
|--------------------|----------------------|
| Target Fisik | : 8,451% |
| Realisasi Fisik | : 12,611% |
| Deviasi | : 4,16% |
| Realisasi Keuangan | : Rp. 598.903.200,00 |
8. Peningkatan Jalan Ambil-Ambil Tanjung (DPUPR)
- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| Pagu Anggaran | : Rp. 2.000.000.000,00 |
| Sumber Dana | : APBD |
| Nilai Kontrak | : Rp. 1.975.760.000,00 |
| Nama Penyedia | : CV Rorin Berdikari |
| Jangka Waktu Pelaksanaan | : 90 Hari Kalender |
| Waktu Pelaksanaan | : 8 Juni – 4 Desember 2026 |
| Target Fisik | : 19% |
| Realisasi Fisik | : 100% |
| Deviasi | : 81,34% |
| Realisasi Keuangan | : Rp. 592.728.000,00 |
9. Rehabilitasi Jembatan Sayegan (DPUPR)
- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Pagu Anggaran | : Rp. 1.950.000.000,00 |
| Sumber Dana | : APBD |
| Nilai Kontrak | : Rp. 1.490.892.000,00 |
| Nama Penyedia | : CV. Tunggal Tri Perkasa |
| Jangka Waktu Pelaksanaan | : 155 Hari Kalender |
| Tahapan Kegiatan | : Proses Penandatanganan Kontrak |
10. Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Bekonang–Mojo (DPUPR)
- | | |
|--------------------------|--|
| Pagu Anggaran | : Rp. 1.800.000.000,00 |
| Sumber Dana | : APBD |
| Jangka Waktu Pelaksanaan | : 90 Hari Kalender |
| Tahapan Kegiatan | : Persiapan pengadaan (Reviu DPP oleh Pokja) |

Adapun rekapitulasi progres pelaksanaan kegiatan Proyek Strategis Tahun Anggaran 2026 per 21 Juli 2026 secara lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran V yang tidak terpisah dari laporan ini.

BAB VIII INFRASTRUKTUR

Sampai dengan 8 Juli 2026, pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

Jumlah Paket Pekerjaan Infrastruktur	:	292 paket
Belum Proses Pengadaan	:	143 paket (48,97%)
Sedang Proses Pengadaan	:	99 (33,90%)
Selesai Proses Pengadaan	:	50 paket (17,12%)
Progress Fisik	:	38,86%

Adapun rincian progress kegiatan infrastruktur sampai dengan November 2025 sebagai berikut:

Tabel 8.1
Perkembangan Kegiatan Infrastruktur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026
s.d 8 Juli 2026

No	Nama OPD	Jumlah Paket Pekerjaan Konstruksi (RUP)	Proses Pemilihan Penyedia			Progres Fisik (%)
			Belum Proses	Sedang Proses	Selesai Proses	
1	Dinas Kesehatan	1	0	0	1	100,00%
2	Dinas Perhubungan	8	3	0	5	55,63%
3	Dinas Lingkungan Hidup	11	0	2	9	47,73%
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	8	1	0	7	38,21%
5	Sekretariat Daerah	3	2	0	1	33,33%
6	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	71	1	47	23	17,44%
7	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	18	0	16	2	11,11%
8	Dinas Pertanian Dan Perikanan	27	0	25	2	7,41%
9	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	94	94	0	0	0,00%
10	Kecamatan Sukoharjo	31	30	1	0	0,00%
11	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	17	11	6	0	0,00%
12	Kecamatan Kartasura	2	0	2	0	0,00%
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	1	1	0	0	0,00%
	TOTAL	292	143	99	50	38,86%

Sumber : Data diolah

BAB IX PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Realisasi anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 sampai dengan bulan Juni 2026 adalah sebesar Rp. 921.912.470.985,00 (45,72%).
2. Bantuan Keuangan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2026 mengalami perubahan akibat kebijakan efisiensi yang membuat jumlah kegiatan berkurang yang semula 7 kegiatan menjadi 4 kegiatan. Dari 4 kegiatan tersebut, baru 1 kegiatan yang telah memperoleh persetujuan dari Provinsi dan sudah berjalan, yaitu kegiatan TMMD yang diampu oleh DPMD.
3. Dari 10 proyek strategis, sebanyak 8 proyek telah memasuki tahap pelaksanaan dengan realisasi fisik melampaui target, termasuk 2 proyek yang telah selesai 100%, sedangkan 2 proyek lainnya masih berada pada tahap awal pelaksanaan dan proses pengadaan.
4. Dari total 292 paket pekerjaan infrastruktur, 50 paket pekerjaan sudah selesai proses pengadaannya, dengan realisasi fisik mencapai 38,86%.

B. REKOMENDASI

Untuk meningkatkan kinerja APBD pada triwulan berikutnya, setiap perangkat daerah perlu mempercepat penyelesaian kegiatan yang masih berlangsung dan menindaklanjuti setiap kendala teknis maupun administratif yang berpotensi menghambat penyerapan anggaran. Perangkat daerah juga perlu memperkuat pengendalian pelaksanaan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala, meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak terkait, serta memastikan setiap tahapan pekerjaan terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, perangkat daerah harus mengoptimalkan pencapaian target *output* dan realisasi keuangan agar pelaksanaan APBD berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Melalui upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta mendukung tercapainya target pembangunan daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

Demikian gambaran singkat tentang kinerja kegiatan APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026 yang sudah berjalan sampai dengan bulan Juni 2026 sebagai bagian dari proses manajerial, serta bahan evaluasi terhadap kegiatan APBD Tahun Anggaran 2026.

Sukoharjo, Juli 2026

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo

Yudi Saharjo, SE, MM
Pembina
NIP 197603102011011006